



**FISH
FOREVER**



Membangun Badan Pengelola yang Efektif di Tingkat Masyarakat

Membangun Badan Pengelola yang Efektif di Tingkat Masyarakat

Courtney Cox, Roquelito Mancao, Claudia Quintanilla, dan Abel Valdivia 2019

Kontributor

Rizaller Amolo, Dean Apistar, Edson Anselmo José, Farishta Asmaty, Monique Barreto Galvao, Steve Box, Atanasio Brito, Stuart Campbell, Eline Canares, Raymond Jakub, Hari Kushardanto, Bruna Martins, Jasmine Mendiola, Kevin Mesebeluu, Mayra Nascimento, Christian Perez, Alice Pires, Maura Sousa, George Stoyle, dan Ade Yuliani

Rare

Rare adalah organisasi terdepan dalam hal perubahan perilaku bagi konservasi. Rare mengkhususkan diri dalam mengidentifikasi solusi lokal yang telah terbukti dan bekerja dengan mitra serta komunitas di seluruh dunia untuk menghadirkan solusi ini ke skala regional dan nasional.

FishForever

Fish Forever adalah sebuah solusi yang diprakarsai oleh komunitas Rare untuk merevitalisasi habitat laut pesisir, seperti terumbu karang, bakau, dan lamun; melindungi keanekaragaman hayati, dan mengamankan mata pencaharian rumah tangga nelayan dan masyarakatnya. Solusi ini menggunakan pendekatan inovatif untuk menjawab persoalan penangkapan ikan berlebihan di pesisir — dengan memberdayakan masyarakat melalui hak yang jelas, tata kelola yang kuat, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan partisipatif — yang melindungi habitat ikan yang penting dan mengatur aktivitas penangkapan ikan.

Foto sampul depan: © George Stoyle / Rare

Sitasi:

FishForever (2019) Membangun Badan Pengelola yang Efektif di Tingkat Masyarakat. Cox, C., Mancao, R., Quintanilla Q., dan Valdivia, A. (Ed). Rare, Inc. Arlington, Virginia, 4 hlm. *Diperbarui Jan 2021*

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
FF 2.0 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MEMBANGUN BADAN PENGELOLA YANG EFEKTIF DI TINGKAT MASYARAKAT	3
PRINSIP DASAR SECARA RINCI	3
MEMBUAT DAFTAR PERIKSA BADAN PENGELOLA DI TINGKAT MASYARAKAT	4

PENDAHULUAN

Perikanan berbasis komunitas masyarakat pesisir merupakan kegiatan lokal yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, pendekatan pengelolaan yang berlaku untuk perikanan ini belum mencerminkan karakteristik sentral ini. Terdapat kesenjangan kritis pada perikanan berbasis masyarakat pesisir karena kerangka kerja tata kelola dan pengambilan keputusan di sekitarnya tidak jelas, terlalu kompleks, atau terpusat di pihak berwenang nasional. Bahkan, di negara-negara yang kewenangan untuk mengelola perikanan pesisirnya telah dilimpahkan ke tingkat lokal sekalipun, masih terdapat kesenjangan kapasitas yang kronis dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pengelolaan yang efektif di tingkat masyarakat atas sektor perikanan yang berbeda dan beragam ini.

Tantangan utama Fish Forever yaitu membangun sistem pengelolaan yang menghubungkan pengambilan keputusan lokal yang mencerminkan sifat perikanan berbasis masyarakat dengan skala ekologi yang lebih besar yang diperlukan untuk mempertahankan spesies target serta skala politik yang diperlukan untuk menyelaraskan pendekatan di seluruh wilayah geografis yang lebih luas.

Fish Forever tidak bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan dan kerangka tata kelola yang sama sekali baru di seluruh wilayah pesisir. Upaya yang lebih praktis untuk dilakukan yaitu memasukkan badan pengelola di tingkat masyarakat ke dalam sistem tata kelola yang sudah ada dan memanfaatkan kapasitas pengelolaan laten, jika memungkinkan. Strategi Fish Forever yaitu membangun kapasitas kelompok pengelola di tingkat masyarakat untuk memastikan pengambilan keputusan yang transparan, adil dan representatif untuk perikanan lokal yang mencerminkan keinginan masyarakat konstituen dan pemangku kepentingannya. Strategi yang selanjutnya dilakukan yaitu memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok ini dan pemerintah daerah serta badan-badan nasional yang memiliki mandat yang relevan mengenai perairan teritorial atau ekstraksi sumber daya. Strategi terakhirnya yaitu membangun pengelolaan bersama yang efektif dan kemudian membangun jaringan kelompok pengelolaan lokal ini secara horizontal untuk menyelaraskan pendekatan pengelolaan di tingkat masyarakat di sepanjang garis pantai.

Fish Forever bertujuan membangun kapasitas lokal yang memungkinkan badan pengelola untuk secara legal menetapkan dan mempertahankan batas terhadap upaya penangkapan ikan di wilayah tertentu untuk memberi manfaat bagi nelayan konstituen yang telah disepakati dari masyarakat lokal. Tujuan ini merupakan bagian inti dari teori pengelolaan akses area perikanan. Jika upaya penangkapan ikan tidak dibatasi, tidak ada nilai tambah dalam model pengelolaan karena pendatang baru dalam sektor perikanan akan menyerap nilai tambah apa pun yang diperoleh dari pengelolaan yang lebih baik. Membangun mekanisme dan desain yang cermat untuk memungkinkan badan pengelola menetapkan dan melaksanakan pembatasan upaya secara adil, mengidentifikasi potensi konflik, dan menyelesaikan sengketa terkait kawasan pesisir dan perikanan merupakan tujuan utama di bawah strategi tahap II Fish Forever.

Selain membentuk dan memperkuat badan pengelolaan lokal di tingkat masyarakat, Fish Forever akan bekerja dalam kluster-kluster kelompok pengelolaan lokal sehingga menghubungkan pemerintah daerah dengan jaringan pengelolaan terkoordinasi subnasional lintas batas politik dan yurisdiksi agar sesuai dengan skala ekologis yang lebih besar yang diperlukan untuk konservasi ekosistem dan perikanan berkelanjutan yang efektif. Skala subnasional ini dapat berupa negara bagian atau provinsi, bentang laut, wilayah pengelolaan perikanan luas yang telah ditetapkan, atau beberapa unit tata ruang lain yang diakui yang bertanggung jawab atas ratusan kilometer garis pantai. Dengan menempatkan pendekatan ini ke dalam sistem tata kelola dan unit perencanaan tata ruang yang sudah ada dan berukuran lebih besar, program ini akan berfokus pada penguatan dan kemudian menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, atau perwakilan masyarakat lokal lainnya untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan tentang perikanan pesisir yang ada dan memengaruhi rezim pengelolaan subnasional.

FF 2.0 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MEMBANGUN BADAN PENGELOLA YANG EFEKTIF DI TINGKAT MASYARAKAT

1. Badan pengelola di tingkat masyarakat memiliki mandat hukum untuk mengelola perikanan dan menegakkan kebijakan perikanan
2. Badan pengelola di tingkat masyarakat terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi yang sesuai
3. Badan pengelola di tingkat masyarakat mewakili semua pemangku kepentingan terkait yang ada di masyarakat setempat
4. Badan pengelola di tingkat masyarakat bersifat transparan dan akuntabel
5. Badan pengelola di tingkat masyarakat mengadakan rapat rutin
6. Terdapat rencana pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan
7. Terdapat rencana koordinasi eksternal untuk mengidentifikasi jalur-jalur yang dapat digunakan untuk memengaruhi dan memberikan informasi di tingkat sub-nasional dan nasional

PRINSIP DASAR SECARA RINCI

1. Badan pengelola di tingkat masyarakat memiliki mandat hukum untuk mengelola perikanan dan menegakkan kebijakan perikanan
 - a. Terdapat kebijakan nasional atau subnasional yang memberikan kewenangan kepada badan pengelola lokal di tingkat masyarakat untuk mengelola perikanan dan menegakkan kebijakan perikanan
 - b. Lihat panduan kebijakan dan tata kelola untuk strategi FF 2.0 untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di tingkat nasional dan subnasional
2. Badan pengelola di tingkat masyarakat terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan karakteristik berikut ini
 - a. Proses pengambilan keputusan yang efektif
 - b. Pelaksanaan kebijakan
 - c. Penegakan dan pengawasan (dapat berasal dari polisi setempat, polisi hutan)
 - d. Perencanaan secara organisasional maupun partisipatif
 - e. Perencanaan keuangan
 - f. Komunikasi dan koordinasi
 - g. Resolusi konflik
 - h. Jaringan
 - i. Pelaporan pengelolaan untuk melacak kegiatan dan hasil
 - j. Menafsirkan data perikanan dan ekologis untuk pengambilan keputusan
 - k. Hubungan yang kuat dengan pemimpin dan organisasi terkait yang diperlukan untuk memengaruhi kebijakan dan berbagi kisah sukses secara luas
3. Badan pengelola di tingkat masyarakat mewakili semua pemangku kepentingan terkait yang ada di masyarakat setempat (mempertimbangkan kesetaraan gender dan usia, kesetaraan, dan representasi di antara pemangku kepentingan)

- a. Nelayan
 - b. Perempuan
 - c. Pembeli/pedagang
 - d. Pejabat pemerintah
 - e. Organisasi konservasi
 - f. Lainnya, jika sesuai (mis. akademisi, lembaga keagamaan, lembaga berbasis desa, lembaga yang saat ini sudah bekerja secara lokal)
4. Badan pengelola di tingkat masyarakat bersifat transparan dan akuntabel
 - a. Tujuan ditentukan dan ditetapkan secara jelas
 - b. Proses pengambilan keputusan ditentukan di dalam rencana pengelolaan dan/atau instrumen kebijakan
 - c. Terdapat rencana komunikasi untuk membagikan keputusan kepada anggota masyarakat
 5. Badan pengelola di tingkat masyarakat mengadakan rapat rutin
 - a. Rapat untuk menilai rencana pengelolaan dan menetapkan kendali perikanan baru sesuai kebutuhan
 - b. Rapat untuk menilai kebutuhan operasional dan keuangan
 - c. Rapat untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)
 6. Terdapat rencana pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan
 7. Terdapat rencana koordinasi eksternal untuk mengidentifikasi jalur-jalur yang dapat digunakan untuk memengaruhi dan memberikan informasi di tingkat subnasional dan nasional

MEMBUAT DAFTAR PERIKSA BADAN PENGELOLA DI TINGKAT MASYARAKAT

- Tinjau kebijakan dan perundang-undangan yang relevan (kaitan antara pemerintah daerah dan nasional/subnasional)
- Struktur organisasi dan pemilihan anggota
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (protokol dan aturan)
- Pelatihan kompetensi untuk anggota
- Kerangka acuan untuk anggota
- Penjadwalan dan pengaturan rapat
- Prosedur operasional standar (internal)
- Rencana kerja dan keuangan
- Memantau dan mengevaluasi badan pengelola di tingkat masyarakat